

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Fase baru dalam tonggak sejarah bangsa Indonesia dimulai ketika diproklamasikannya Indonesia di Jakarta pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan Indonesia harus melewati dan mengorbankan banyak hal untuk merebutnya. Bangsa Indonesia pun tidak mudah untuk membangun dan menjadi sebuah negara yang berdaulat. Sementara proklamasi hanya menjadi suatu titik awal momentum revolusi kebangkitan bangsa Indonesia untuk menciptakan pemerintahan bagi bangsanya sendiri. Namun bukan hanya proses mendapatkan kemerdekaan saja yang harus ditempuh oleh bangsa Indonesia bahkan proses mempertahankan kemerdekaan tersebut juga harus ditempuhnya dengan jalan yang cukup panjang.

Kemerdekaan yang sudah diproklamasikan itu mendapat tantangan besar dari Jepang maupun Belanda. Jepang yang dahulu berjanji tentang kemerdekaan Indonesia sedikit memberikan sikap lain atas adanya kemerdekaan Indonesia. Posisi Jepang yang, di satu sisi harus berurusan dengan desakan rakyat Indonesia yang sedang dalam revolusi kemerdekaannya, disisi lain pula Jepang harus berurusan dengan Sekutu karena adanya Deklarasi Postdam. Jepang menerima deklarasi tersebut oleh Tenno Heika Hirohito, yang meskipun menurut undang-undang dasar tidak mempunyai kekuasaan memutuskan (Koen, 1958, hlm. 336). Keputusan tersebut diambil Tenno untuk menyelamatkan masyarakat Jepang sendiri yang sudah hancur di akhir perang ini dan tidak ingin kembali memakan korban jiwa.

Dengan kekalahan dalam Perang Dunia II, mau tidak mau Jepang harus tunduk pada perintah Sekutu pasca menyerahnya Jepang secara militer pada 14 Agustus 1945. *Allied Southeast Asia Command* secara tegas memerintahkan Jepang untuk mempertahankan status quo hingga pasukan Sekutu datang untuk mengambil alih (Kahin, 2013, hlm. 200). Dengan demikian mau tak mau Jepang harus melaksanakan perintah tersebut. Hal itulah yang mempengaruhi sikap

Jepang pula terhadap jalannya revolusi di Indonesia. Sekutu yang mulai memasuki Indonesia, berada di bawah komando Asia Tenggara (*South East Asia Command* atau SEAC) dibawah pimpinan Laksamana Lord Louis Mountbatten (Poesponegoro & Nugroho, 1993, hlm. 121).

Tentara Sekutu sendiri yang tiba di Indonesia terdiri atas tiga divisi yang tergabung dalam *Allied Forces Netherlands East Indies* (AFNEI) yang diberikan tugas untuk melindungi dan menjalankan pemindahan tawanan-tawanan perang, selain itu ditugaskan pula untuk mengurus kamp interniran dan para orang-orang Jepang yang masih ada di Indonesia sebagai tahanan perang yang diselenggarakan oleh badan yang bernama RAPWI (*Rehabilitation Allied Prisoners of War and Interness*) (Disjarahdam VI/Siliwangi, 1968, hlm 46). Melihat tugas AFNEI tersebut, awalnya tidak ada kekhawatiran akan terganggunya kemerdekaan Indonesia yang secara *de facto* proklamasi kemerdekaannya sudah dilakukan. Terlebih Ahmad Subardjo sebagai Menteri Luar Negeri saat itu berkata (Dalam Nasution, 1956:17), "... kedatangan tentara Sekutu di Indonesia untuk mengganti tentara Nippon itu tidak berarti, bahwa kemerdekaan Indonesia terhapus". Hal tersebut semakin menepis adanya anggapan bahwa datangnya Sekutu ke Indonesia untuk merebut dan menguasai kembali Indonesia.

Namun kekhawatiran tersebut muncul kembali ketika masuknya AFNEI dibarengi dengan masuknya NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*). NICA itu didirikan di Australia pada masa Perang Dunia II dengan maksud untuk menerima kembali pemerintahan Indonesia setelah masa pendudukan Sekutu selesai (Disjarahdam VI/Siliwangi, 1968, hlm 45). Tak ayal, kedatangan Sekutu tersebut sebuah pelanggaran kepada Indonesia yang sudah mengumumkan kemerdekaannya. Akibatnya masyarakat Indonesia beranggapan buruk terhadap AFNEI sebagai tentara sekutu yang bertugas, senyatanya bertindak sebagai pelopor penjajahan kembali Belanda, menyelundupkan alat-alat dan atau unsur-unsur penjajahan Belanda (Nasution, 1977, hlm. 22). Secara tidak langsung AFNEI memfasilitasi NICA untuk kembali ke Indonesia dan membuktikan bahwa negara-negara pemenang perang sulit untuk mengakui kemerdekaan Indonesia yang berdiri di atas bekas wilayah peperangan. Hal tersebut tidak terlepas dari

adanya perjanjian antara Pemerintahan Belanda dan Inggris soal Indonesia. Perjanjian tersebut merupakan Perjanjian Urusan Pemerintahan Sipil (*Civil Administration Affair Agreement*) pada 24 Agustus 1945 yakni sebagai salah satu anggota Sekutu, Belanda mempunyai hak memperoleh kembali daerah jajahannya, dan Inggris bersedia membantunya (Sudarjat, 2012, hlm.67). Hal tersebut membuat Indonesia diambang kembali dijajah oleh Belanda. Secara tidak langsung Belanda ingin mengagalkan kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamasikan sebelumnya.

Melihat adanya keadaan tersebut, dalam upaya mempertahankan kemerdekaan sangat diperlukan juga urusan militer termasuk untuk membentuk satuan tentara republik. Keinginan pembentukan tentara pun muncul untuk mengatasi keamanan dan ketertiban pasca proklamasi dan masuknya pasukan Sekutu ke Indonesia. Rakyat khawatir bahwa Indonesia akan terjajah kembali. Hal diatas yang menyadari akan perlunya segera dibentuknya sebuah tentara kesatuan yang utuh. Seperti yang diungkapkan Adam Malik (1970, hlm. 67)

“... Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya, maka tentaranya pun harus sekejap itu juga dibentuk. Negara yang tidak bertentara berarti negara yang mati. Pun Republik kita yang baru didirikan mesti mempunyai tulang punggung, harus mempunyai tentara yang dapat digerakan sewaktu-waktu disamping tentara rakyat (tentara revolusi), jika tidak maka Jepang yang masih lengkap persenjataannya itu akan mudah menggempur Republik kita. Supaya jangan meragukan Sekutu, hal ini nanti kita sampaikan secara formal kehendak kita”.

Secara langsung apa yang diungkapkan Adam Malik di atas mengisyaratkan bahwa betapa pentingnya pembentukan tentara di tengah keamanan dan ketertiban pasca kemerdekaan Indonesia. Namun tidak hanya itu, melainkan juga untuk mempertahankan kedaulatan negara yang baru merdeka ini. Secara militer sendiri Indonesia sudah mempunyai satuan tentara yang berasal dari kalangan PETA (Pembela Tanah Air) dan Heiho yang dibuat Jepang. Heiho sendiri pada masa kependudukannya untuk memperkuat pasukan-pasukan Jepang. Namun pada kenyataannya mereka diperlakukan sebagai manusia kelas rendah (Surjohadiprodo, 1971:12). Namun Jepang menghambat hal tersebut dengan mengumumkan pembubaran Peta, Heiho dan semua organisasi Indonesia

bersenjata (Kahin, 2013, hlm. 196). Keputusan tersebut merupakan suatu bentuk dari Jepang dalam menghalangi jalannya revolusi Indonesia.

Dengan melihat adanya situasi tersebut, sebagai negara yang baru saja didirikan itu mengambil inisiatif untuk mengeluarkan kebijakan lewat suatu badan yang didirikan Jepang dimasa akhir kekuasaannya di Indonesia, yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Kebijakan yang akan dikeluarkan tersebut berdasarkan dengan keadaan yang dialami. Maka dilakukanlah rapat yang dilaksanakan dalam Sidang PPKI. Sidang dilaksanakan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan dilakukan, yakni pada tanggal 18-22 Agustus 1945.

Salah satu dari hasil Sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 berisi kesepakatan untuk membentuk suatu badan keamanan dan ketertiban, maka dibentuklah BKR (Badan Keamanan Rakyat) dibawah organisasi Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Sebagian besar pemuda Indonesia terutama bekas anggota PETA, KNIL, dan Heiho, artinya pemuda-pemuda yang sudah mempunyai pengalaman militer, mengambil sikap pragmatis, dan segera membentuk BKR di daerah tempat tinggalnya dan memanfaatkan BKR itu sebaik-baiknya sebagai wadah perjuangan (Poesponegoro & Nugroho, 1993, hlm. 107). Selain itu bekas-bekas perwira PETA kemudian diangkat sebagai pemimpin-pemimpin BKR itu (Surjohadiprojo, 1971, hlm. 12). Hal tersebut setidaknya pemerintah menghimpun dan mewadahi para mantan tentara yang berasal dari satuan militer Jepang maupun Belanda untuk berjuang, walaupun belum berbentuk satuan ketentaraan.

Awalnya pembentukan BKR untuk mengatasi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, BKR sendiri merupakan suatu badan yang mengatasnamakan tentara, bukan berarti BKR dibuat tanpa maksud dan manfaat. Tidak dipungkiri bahwa BKR merupakan suatu korps pejuang bersenjata yang bersumber pada prakarsa rakyat khususnya para pemuda (Notosusanto, 1968:70). Dengan keadaan yang semakin genting karena adanya beberapa insiden antara masyarakat Indonesia termasuk BKR di dalamnya dengan tentara Sekutu, terutama setelah mengalami sendiri tindakan-tindakan provokatif dan bahkan agresif dari pasukan-pasukan Belanda yang oleh tentara Serikat dikeluarkan dari

tawanan Jepang serta kemudian diprsenjatai, Pemerintah RI menyadari, bahwa sebuah tentara regular bukan sebuah suatu lux (Poesponegoro & Nugroho, 1993, 109). Dalam hal ini peran BKR bukan lagi hanya sekedar menjaga keamanan dan ketertiban pasca proklamasi saja agar terciptanya keadaan yang kondusif bagi masyarakat, namun juga sudah mulai untuk menjaga kedaulatan negara. Terutama dengan adanya keputusan pasca kalahnya Jepang pada Perang Dunia II di Asia Pasifik dan masuknya para tentara Sekutu ke wilayah Indonesia.

Hal diatas yang menyadari akan perlunya segera dibentuknya sebuah tentara kesatuan yang utuh. Dikutip dari Adam Malik dalam buku Riwayat Proklamasi disebutkan

“... Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya, maka tentaranya pun harus sekejap itu juga dibentuk. Negara yang tidak bertentara berarti negara yang mati. Pun Republik kita yang baru didirikan mesti mempunyai tulang punggung, harus mempunyai tentara yang dapat digerakan sewaktu-waktu disamping tentara rakyat (tentara revolusi), jika tidak maka Jepang yang masi lengkap persenjataannya itu akan mudah menggempur Republik kita. Supaya jangan meragukan Sekutu, hal ini nanti kita sampaikan secara formal kehendak kita”.

Secara langsung apa yang diungkapkan Adam Malik diatas mengisyaratkan bahwa betapa pentingnya pembentukan tentara ditengah keamanan dan ketertiban pasca kemerdekaan Indonesia. Namun tentara bukan hanya bertugas memelihara keamana dan ketertiban melainkan juga untuk mempertahankan kedaulatan negara yang baru merdeka ini. Secara militer sendiri Indonesia sudah mempunyai tentara dari PETA (Pembela Tanah Air) dan Heiho yang dibuat Jepang. Heiho sendiri pada masa kependudukannya untuk memperkuat pasukan-pasukan Jepang. Namun pada kenyataannya mereka diperlakukan sebagai manusia kelas rendah (Surjohadiprojo, 1971:12). Maka pembentukan BKR yang diinstruksikan melalui hasil Sidang PPKI belum cukup untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara dan keberadaan tentara tentu sangat diperlukan.

Perjuangan kemerdekaan Indonesia menyebar ke berbagai daerah-daerah di Indonesia beriringan berita proklamasi yang menyebar dengan tidak terkecuali

salah satu daerah terdekatnya yaitu Bogor yang merupakan salah satu wilayah terdekat dari pusat pemerintahan Jakarta. Berita proklamasi tiba di Bogor pada siang hari, disampaikan dari mulut ke mulut dan melalui radio-radio umum yang diletakan di tempat strategis (Sudarjat, 2015, hlm. 47). Dengan menyebarnya berita proklamasi ini mengundang beberapa macam tanggapan, sebagian rakyat menerimanya dengan was-was, ragu dan bertanya-tanya akan adanya kemerdekaan ini. Namun sebagian lagi rakyat menerima berita tersebut dengan bahagia (Burhan. dkk, 1986:39). Dua sikap yang berbeda merupakan salah satu bentuk dinamika di rakyat sendiri, rakyat masih takut berita tersebut hanya untuk menutupi berita kalahnya Jepang kepada Sekutu. Namun disisi lain siapa yang tidak gembira dengan adanya kemerdekaan yang dianggap sebagai bentuk kebebasan dari segala macam bentuk penindasan dari bangsa manapun.

Pergolakan perjuangan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan di Bogor tidak jauh berbeda dengan daerah lain. Bogor merupakan satu daerah karesidenan yang cukup luas. Karesidenan Bogor mencakup kabupaten Bogor, Sukabumi dan Cianjur (Sudarjat, 2012, hlm. 48). Dalam beberapa perjalanan perjuangan di Bogor yang saat itu memasuki ini masa bersiap (Iskandar dalam Sudarjat, 2015:50) diambil dari aba-aba “Siaaap!”. Aba aba khas ini senantiasa diteriakan para pemuda untuk siap berkumpul dan berbaris agar siap bertempur melawan sekutu. Para pemuda berkumpul dengan segera berhimpun dalam satu organisasi yang bernama Angkatan Muda Republik Indonesia (Burhan. dkk, 1986:40). Pemuda dihimpun dalam satu kekuatan agar mereka mempunyai satu tujuan yang sama dan tidak banyak tercerai-berai dalam kelompok-kelompok lain. Hal itu menjadi awal dari berhimpunnya pemuda untuk perjuangan kemerdekaan di Bogor.

Upaya-upaya lain rakyat Bogor dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dibuktikan dengan adanya pengambil alihan dan pembentukan perangkat pemerintahan sesuai dengan apa yang diperintahkan pemerintah pusat di Jakarta. Hal tersebut dilakukan secara cepat dan menyeluruh agar rakyat Bogor pun dengan cepat berupaya untuk menentukan nasib bersama dan tidak lagi dibawah oleh bangsa asing. Namun bukan hanya dalam ranah pemerintah dan

diplomatik saja namun juga mempertahankan kemerdekaan lewat upaya pertempuran bersenjata. Sebagai daerah Indonesia dan juga tunduk kepada keputusan dan kebijakan pemerintah pusat, Bogor mengikuti kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat kala itu, salah satunya dengan membuat BKR untuk daerah Bogor. Hal tersebut juga menunjukkan bersiapnya para pejuang Bogor diperlihatkan dengan turut dibentuknya (BKR) sebagai awal dari badan ketentaraan untuk daerah Bogor pada 23 Agustus 1945 yang dihadiri oleh pengurus BPKKP dan mantan Chudanco dan Daidanco PETA (Sudarjat, 2015: hlm.54). Hal tersebut berselang satu hari dari Sidang II PPKI yang memerintahkan adanya pembentukan BKR dalam lingkup nasional dan juga di daerah-daerah. Selanjutnya BKR bertransformasi menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang diinstruksikan secara langsung oleh Presiden Soekarno melalui Maklumat 5 Oktober 1945. Pembentukan TKR merupakan awal dari pembentukan satuan tentara yang nanti akan berkembang menjadi Tentara Nasional Indonesi (TNI).

Penulis disini ingin mengangkat dan meneliti bagaimana pembentukan TNI di Bogor dan melihat bagaimana cara pembentukannya hingga bagaimana TNI tersebut mempunyai peran dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kajian tentang pembentukan dan kiprahnya TNI di Bogor ini dilihat penulis menjadi satu sisi yang menarik untuk diangkat dan diteliti secara tersendiri. Terutama dalam hal ini penulis mengangkat bagaimana pembentukan TNI di Bogor ini melihat peran masyarakat dan tokoh yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari para mantan Tentara PETA maupun KNIL, pemuda hingga para alim ulama ditambah dengan beberapa orang dari laskar-laskar perjuangan yang memilih masuk kedalam satuan prajurit TNI dan meninggalkan laskarnya. Selain itu pula penulis mengangkat bagaimana posisi dan perkembangan TNI sebagai lembaga keamanan negara dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan negara bukan hanya di Indonesia namun juga di daerah Bogor.

Dengan adanya kajian menarik ini ditulis sebagai pengetahuan yang nantinya dapat dijadikan sebagai satu referensi kesejarahan perjuangan daerah-daerah di Indonesia yang harusnya diketahui oleh rakyat Indonesia pada umumnya dan masyarakat daerah Bogor pada khususnya. Kajian ini sebagaimana

gambaran dari jalan panjang perjuangan rakyat Bogor mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Dan pada akhirnya dari semua yang tertulis diatas, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dengan judul “Tentara Nasional Indonesia: Kiprahnya dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia di Bogor”.

1.2 Rumusan Masalah

Keperluan pertahanan dan keamanan merupakan sebuah hal yang penting bagi suatu bangsa, apalagi disaat Indonesia merebut kemerdekaan. Dengan hal tersebut pentingnya menjaga dan mempertahankan keamanan dalam negara sudah tidak dipungkiri lagi . Walaupun di Indonesia badan keamanan dibuat ditengah-tengah kondisi negara yang belum stabil dan tidak dibuat secepat badan-badan pemerintahan lain, namun adanya tersebut setidaknya dapat menjaga keamanan negara diawal-awal kemerdekaan dan sebelum Sekutu datang.

Dengan berdasarkan hal di atas maka studi penelitian ini mencoba mengungkap permasalahan umum “*Bagaimana Kiprah Tentara Nasional Indonesia (TNI) Bogor dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1949?*” . Adapun masalah dalam penelitian ini yang dirumuskan sebagai berikut

1. Mengapa TNI dibentuk?
2. Bagaimana perkembangan TNI sebagai lembaga pertahanan pada periode Revolusi Indonesia?
3. Bagaimana perjuangan TNI menghadapi Sekutu dan Belanda dalam mempertahankan kemerdekaan di Bogor?
4. Apa dampak dari perjuangan TNI di Bogor terhadap TNI dan Indonesia khususnya daerah Bogor dan Belanda dan Sekutu?

1.3 Tujuan Penelitian

Bersamaan dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan, tujuan penelitian secara umum dalam penulisan karya ilmiah Tentara Nasional Indonesia: Kiprahnya dalam Mempertahankan Kemerdekaan di Bogor (1945-1949) ini adalah untuk mengetahui bagaimana kiprah dari TNI sebagai badan ketentaraan

yang bertugas dalam mempertahankan kemerdekaan di Kota Bogor. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Menjelaskan proses pembentukan TNI sebagai lembaga pertahanan negara pada masa periode revolusi 1945-1949.
2. Menjelaskan proses pembentukan dan perkembangan TNI terutama di Kota Bogor.
3. Menjelaskan perjuangan TNI dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia melawan Sekutu di Kota Bogor.
4. Menjelaskan dampak dari perjuangan TNI pada saat mempertahankan kemerdekaan di Bogor bagi Indonesia terutama daerah Bogor dan Sekutu.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulis dalam penulisan skripsi ini secara khusus terutama untuk memperkaya penelitian dan penulisan sejarah khususnya dalam penulisan mengenai dunia kemiliteran Indonesia yaitu TNI dan sejarah Kota Bogor itu sendiri. Maka, disusunlah manfaat dari penelitian skripsi ini ialah :

1. Menjelaskan proses pembentukan dan perkembangan TNI sebagai lembaga pertahanan negara.
2. Dapat mengungkapkan perjuangan TNI dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
3. Memperkaya khazanah penulisan sejarah lokal Kota Bogor terutama mengenai perjuangan bersenjata yang dilakukan TNI pada masa Revolusi Indonesia
4. Memperkaya referensi dalam dunia pendidikan sejarah sebagai bahan dari materi mata pelajaran sejarah di sekolah terutama di tingkat SMA/MA kelas XI Sejarah Wajib pada Kompetensi Dasar 3.1, yakni menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika organisasi penulisan skripsi ini disesuaikan dengan kaidah yang dikeluarkan oleh universitas dimana penulis berstudi yaitu Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Sistematika Penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, penulis mengungkapkan alasan mengenai ketertarikan penulis mengkaji dalam memilih judul penelitian Tentara Nasional Indonesia : Kiprahnya Dalam Mempertahankan Kemerdekaan di Bogor (1945-1949). Bab ini berisikan latar belakang masalah yang dimana membahas latar belakang terkait permasalahan penelitian mengenai penelitian yang akan dikaji. Dalam latar belakang tersebut dituliskan kondisi yang yang terjadi dalam yang mendukung adanya pembentukan TNI tersebut. Agar penelitian ini menjadi lebih fokus, maka di dalam bab ini dituliskan pula rumusan masalah penelitian. Selain itu dituliskan pula tujuan penulsa karya ilmiah agar penulisan ini menjadi terarah. Dimana tujuan penulisan tersebut merupakan hasil turunan dari rumusan masalah yang dituliskan sebelumnya. Ada pula manfaat penulisan yang diharapkan sebagai kegunaan penulisan karya ilmiah yang ditempuh. Sementara di akhir bab I ini dituliskan struktur organisasi skripsi agar skripsi tersebut tersusun secara rapi.

Bab II berisikan kajian pustaka dari penulisan ini. Dimana bab tersebut dituliskan mulai dari konsep dan teori yang relevan dan berhubungan dengan penelitian karya ilmiah ini, seperti konsep Revolusi Indonesia, Perang Kemerdekaan, Tentara Nasional Indonesia dan Teori Konflik. Konsep dan teori tersebut bisa didapatkan dalam Buku, Jurnal maupun sumber-sumber lain yang dianggap relevan. Tidak hanya itu, bab II ini juga berisikan penelitian-penelitian terdahulu seperti skripsi, jurnal, tesis maupun disertasi yang mempunyai satu irisan dengan tema atau judul yang ditulis.

Bab III merupakan bab yang membahas mengenai metode yang digunakan penulis dalam menempuh penulisan karya ilmiah ini. Bab ini berisikan cara-cara yang digunakan penulis dalam penelitian. Dalam hal ini metode yang digunakan merupakan metode penelitian sejarah. Dimulai dari bagaimana penulis melakukan heuristik yaitu mengumpulkan sumber-sumber yang akan digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini. Lalu diungkapkan pula bagaimana proses kritik

sumber, dimulai dari kritik internal hingga eksternal pada sumber yang ditemukan agar dianggap relevan dan otentik. Selanjutnya masuk kepada interpretasi dimana proses tersebut dilakukan untuk menafsirkan fakta-fakta yang didapatkan dari sumber sehingga mendapatkan sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji penulis. Pada tahap akhir merupakan tahap historiografi dimana tahap tersebut merupakan proses penyusunan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bab IV Isi, dalam bab ini dijelaskan inti isi utama dari penelitian yang ditempuh penulis. Dalam bab ini pula merupakan jawaban dari pertanyaan dan rumusan masalah penelitian yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pada bab ini penulis memulai dari Indonesia dan dunia internasional dimana masa tersebut menjadi salah satu kondisi yang melatar belakangi adanya revolusi dan pembentukan TNI. Lalu dipaparkan pula kondisi di sekitar pembentukan TNI nasional, daerah Jawa Barat hingga Bogor. Dalam hal ini apa saja faktor yang mendukung adanya pembentukan TNI tersebut mulai dari kondisi sosial politik hingga adanya kebijakan pembentukan tersebut. Selanjutnya dituliskan bagaimana jalan perjuangan TNI Bogor dalam mempertahankan kemerdekaan. Hingga yang terakhir merupakan dampak yang dihasilkan dari pertempuran tersebut baik yang dialami pihak Indonesia maupun Sekutu.

Bab V simpulan dan saran yang merupakan bab akhir ini dituliskan mengenai simpulan dan saran mengenai pembentukan dan kiprahnya Tentara Nasional Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan di Bogor (1945-1949).